

PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK BERBASIS PESANTREN

(Diterima 20 April 2021 ; direvisi 30 April 2021 ; disetujui 30 April 2021)

Margi Wahono¹; Bunyamin Maftuh²; Elly Malihah³

¹ Mahasiswa Program Doktorat PKn FPIPS UPI

^{2,3} Dosen Program Doktorat PKn FPIPS UPI

e-mail: margi85@upi.edu

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas bagaimana peran pesantren dalam mewujudkan pendidikan resolusi konflik bagi para santri sebagai bekal bagi mereka untuk mampu memahami dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pusat pengajaran agama Islam mempunyai peran yang sangat urgen dalam menjaga dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman religius, etnik, bahasa serta budaya, merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Metode dalam penulisan artikel yaitu dengan menggunakan kajian konseptual dengan cara menganalisis permasalahan dari sumber-sumber yang relevan yakni dari artikel di jurnal maupun dari buku-buku terkait. Pendidikan agama berwawasan multikultural membawa pendekatan dialogis sebagai wahana menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan. Pendidikan resolusi konflik menjadi hal penting yang harus ditanamkan kepada para santri di pondok pesantren karena mereka kelak akan menjadi tokoh panutan di masyarakat yang akan berhadapan dengan berbagai keberagaman yang mungkin saja di dalamnya memiliki potensi munculnya konflik. Sehingga kemampuan untuk manajemen konflik menjadi suatu hal yang harus mereka miliki.

Kata Kunci: Pesantren; Kewarganegaraan Multikultural; Resolusi Konflik

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dihadapkan pada tantangan dengan berbagai konflik sosial yang terjadi (seperti etnisitas, strata sosial, pengangguran, dan kriminalitas) yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Permasalahan suku, agama, ras dan antargolongan yang diberitakan secara masif mengisyaratkan pentingnya penanaman nilai toleransi dan multikulturalisme kepada warga negara muda Indonesia sebagai generasi penerus guna mencegah terjadinya konflik horizontal di masa yang akan datang. Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat merupakan *signal* kuat yang harus diwaspadai pemerintah dan seluruh elemen warga negara sebagai bentuk ancaman *Divide et Impera* model baru dalam merusak persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia (Wibowo dan Wahono, 2017, hlm. 196).

Keragaman yang terjadi sebetulnya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan besar. Namun di lain pihak, keberagaman tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan apabila

seluruh elemen masyarakat tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberagaman tersebut dengan baik. Umat Islam sebagai pemeluk agama yang mayoritas di Indonesia, harus menjadi garda terdepan dalam mengelola dimensi keragaman bangsa ini. Pendidikan Islam sebagai salah satu instrumen penting peradaban umat, perlu dioptimalkan semaksimal mungkin untuk mengelola dinamika keragaman yang ada agar dapat menjadi potensi kemajuan bagi bangsa Indonesia.

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pusat pengajaran agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menekankan pemahaman agama sebagai ruh kehidupan umat manusia, memiliki potensi yang luar biasa sebagai wahana pendidikan resolusi konflik. Menurut catatan resmi kementerian agama, saat ini terdapat sekitar 27 ribu pesantren lebih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kondisi seperti ini menjadikan pondok pesantren sangat potensial untuk dijadikan sebagai sarana

menerapkan nilai-nilai pendidikan resolusi konflik kepada para santri yang nantinya setelah mereka keluar dari pondok pesantren akan menjadi bagian dari masyarakat luas.

Menghubungkan paradigma kewarganegaraan multikultural dengan pondok pesantren sangat relevan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam dan plural, karena eksistensi pesantren secara garis besar diharapkan dapat memiliki peran yang maksimal dan memberi kontribusi yang baik dalam *social engeneering* (rekayasa sosial) dan transformasi sosiokultur bangsa Indonesia. Kehidupan podok pesantren dengan sisi positif negatifnya tentu bukan hal yang asing lagi. Banyak sisi positif yang dapat diperoleh yaitu salah satunya menjadikan para santri sebagai putra putri bangsa Indonesia sebagai generasi penerus yang berakhlaqul karimah. Harapannya dengan karakter yang kuat, para santri sebagai warga negara muda mampu meneruskan perjuangan para pendahulu bangsa di kehidupan ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini

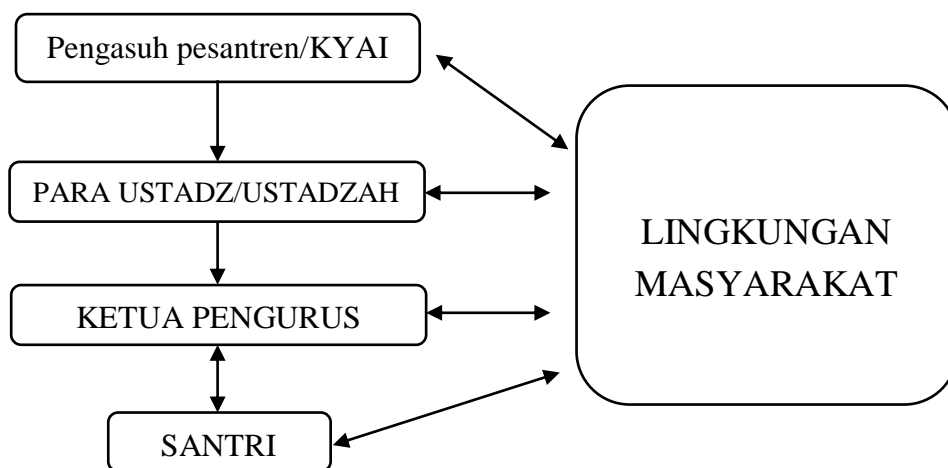
dipilih karena mampu memahami fenomena sebagaimana subjek mengalami, sehingga dapat diperoleh gambaran secara komprehensif tentang peran pondok pesantren dalam mengimplementasikan kewarganegaraan multikultural. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dengan menyelidiki masalah sosial. Penelitian kualitatif sebagai bentuk penelitian yang mengharuskan menemukan suatu makna sebagai hasil dari eksplorasi terhadap data, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara komprehensif dan mendalam dengan melibatkan informan atau partisipan sebagai sumber informasi (Creswell, 2013, hlm. 4).

Artikel ini merupakan kajian konseptual dengan cara menganalisis permasalahan dari sumber-sumber yang relevan yakni dari artikel di jurnal maupun dari buku-buku terkait. Analisis yang dibangun berdasarkan teori atau pengertian teoritis, Jon Jonker (2011) menyatakan bahwa model Konseptual merupakan konstruksi verbal atau visual yang membantu untuk membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak, model konseptual merupakan sebuah model menawarkan kerangka kerja

yang menggambarkan (secara logis) hubungan kausal antara faktor-faktor yang berkaitan.

INTERAKSI DAN PEMBELAJARAN DI PESANTREN

- Proses Pembelajaran di Pesantren



Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan di dalam pondok pesantren adalah interaksi yang terjadi secara vertikal sebagai wujud kepatuhan antara aktor satu dengan aktor yang lain dengan kyai sebagai pemegang otoritas tertinggi. Kyai menjadi penentu atas berbagai kebijakan di pondok pesantren dan pengambil keputusan terakhir ketika terjadi suatu permasalahan. Ketika permasalahan terjadi dalam interaksi antar santri, maka aktor di atasnya yakni ketua

Guna mengamati proses pelaksanaan praktik kewarganegaraan multikultural di lingkungan pesantren, maka diperlukan penggambaran pola interaksi yang terjadi antar aktor yang ada. Pola interaksi di pondok pesantren Annur Lasem dapat digambarkan dalam skema berikut:

pengurus pondok akan merespon penanganan masalah tersebut. Apabila permasalahan belum terselesaikan maka akan ada campur tangan ustadz-ustadzah dan terakhir segala keputusan akan berada di tangan kyai.

Pendidikan agama berwawasan multikultural menjadi dasar bagi kita untuk dapat melakukan pendidikan resolusi konflik, karena Indonesia sebagai bangsa yang memiliki keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan sudah tentu juga

memiliki potensi terjadinya konflik yang cukup besar. Untuk itu, memahami pendidikan resolusi konflik sama artiny dengan menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah arus keberagaman. Sejatimya, pendidikan dibangun atas dasar spirit relasi kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan, dan interdependensi (Muchasan, 2018, hlm. 83). Hal ini merupakan hasil kebaruan yang integral dan komprehensif dalam konten dari pendidikan agama, memberi pondasi pengetahuan baru tentang agama-agama yang bebas dari prasangka, sifat rasisme, dan stereotipe negatif. Pendidikan agama yang berwawasan multikultural memberi pengakuan akan pluralitas sebagai sarana belajar dan mentransformasinya menuju dialog guna membangun kesepahaman dan kesepakatan. Secara lebih detail, terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan dari konsep pendidikan Islam berbasis multikultural. *Pertama*, pendidikan Islam multikultural adalah pendidikan yang menghargai dan merangkul segala bentuk keragaman. Dengan demikian diharapkan akan

tumbuh kearifan dalam melihat segala bentuk keragaman yang ada.

Kedua, pendidikan Islam multikultural merupakan sebuah usaha sistematis untuk membangun pengertian, pemahaman, dan kesadaran anak didik terhadap realitas yang pluralis-multikultural. Hal ini penting dilakukan, karena tanpa adanya usaha secara sistematis, realitas keragaman akan dipahami secara sporadis, fragmentaris, atau bahkan akan memunculkan eksklusivitas yang ekstrem. Pada titik ini, keragaman dinilai dan dilihat secara inferior. Bahkan mungkin tumbuh keinginan untuk melakukan penguasaan dan ambisi untuk menaklukkan mereka yang berbeda. *Ketiga*, pendidikan Islam multikultural tidak memaksa atau menolak anak didik karena persoalan identitas suku, agama, ras, atau golongan. Mereka yang berasal dari beragam perbedaan harus diposisikan secara setara, egaliter dan diberikan medium yang tepat untuk mengapresiasi karakteristik yang mereka miliki. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada yang lebih unggul antara atau anak didik dengan anak didik yang lain. Masing-masing memiliki posisi yang sejajar, dan harus memperoleh perlakuan

yang sama. *Keempat*, pendidikan Islam multikultural memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya *sense of self* kepada setiap anak didik. Ini penting untuk membangun kepercayaan diri, terutama bagi anak didik yang berasal dari kalangan ekonomi kurang beruntung, atau kelompok yang relatif terisolasi.

Kurikulum di pesantren yang bersumber pada wawasan multikultural memang tidak mudah disusun. Suparta (2008, hlm. 46) menjelaskan terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam upaya menyusun kurikulum yang multikultural di lingkungan pondok pesantren, yaitu:

1. Kebudayaan lokal di Indonesia ratusan jumlahnya, maka dari semua puncak-puncak kebudayaan daerah itu harus dipilih beberapa saja yang relevan dan sedikit banyaknya lengkap inventarisasinya.
2. Sejalan dengan otonomi dalam bidang pendidikan, maka sebaiknya pilihan mana yang relevan untuk dimasukkan kedalam mata pelajaran yang bersangkutan, harus diserahkan kepada daerah-daerah otonom untuk merundingkannya sendiri.

PENTINGNYA MULTIKULTURAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Multikulturalisme bukan sekedar pengakuan adanya keanekaragaman itu, akan tetapi sebagai suatu gagasan atau kebijakan politik untuk mengatasi dan menangani keanekaragaman budaya dan klaim-klaim moral, hukum, dan politik yang dibuat atas nama kesetiaan pada etnik, agama, bahasa, atau kebangsaan (Kymlicka, 2001, hlm. 17).

Shachar menyatakan, adalah keliru jika multikulturalisme hanya berhubungan dengan pemberian “perlindungan eksternal” bagi golongan budaya. Karena individu biasanya bisa menjadi anggota beberapa golongan. Misalnya seseorang bisa masuk golongan partai tertentu, juga organisasi lain, anggota profesi, kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial tertentu. Karena itu yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana cara mengalokasi yurisdiksi untuk mengidentifikasi golongan di ajang hukum tertentu, sembari sekaligus menghormati hak-hak anggota golongan sebagai warga negara (Shachar, 2001, hlm. 27-6). Joppke (2001, hlm. 431) mengemukakan *The notion of multicultural citizenship signals a general*

concern for accommodating the universalism of rights and membership in liberal nation-states to the challenge of ethnic diversity and other ascriptive "identity" claims. Pendapat Joppke menunjukkan bahwa Pendidikan kewarganegaraan multikultural begitu penting sekali, hal ini sebagai wujud pengelolaan keragaman terhadap keprihatinan bangsa tentang Identitas, keanekaragaman, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis tuduhan atau prasangka, untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Begitu pentingnya *Citizenship of Multicultural* sehingga menekankan Pendidikan kewarganegaraan multikultural sebagai strategi untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsannya dengan menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada.

Selanjutnya Joppke mengemukakan bahwa pada tataran praktik, sangatlah jarang kewarganegaraan multikultural tertulis di undang-undang setiap negara. Akhirnya, Joppke menyimpulkan kewarganegaraan multikultural bukan hanya sekedar status hukum yang ditetapkan dengan sejumlah hak dan

kewajiban, melainkan juga satu identitas, suatu pernyataan dari keanggotaan seseorang dalam komunitas politik. Kewarganegaraan multikultural yang banyak dibicarakan menunjukkan perhatian umum untuk rekonsiliasi hak-hak universal dan hak-hak keanggotaan dalam negara-negara liberal dengan tantangan keragaman etnis dan klaim "identitas" askriptif yang lainnya.

Budaya kewarganegaraan berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan garis budaya melalui pendidikan, adat istiadat, bahasa, dan agama, dan pengakuan positif atas perbedaan di dalam dan oleh arus utama. Ini adalah wacana yang berkembang, sebagai tanggapan terhadap gelombang besar migrasi lintas kelas selama lima puluh tahun terakhir dan tenaga kerja industri budaya kelas menengah yang semakin mobile yang dihasilkan oleh divisi internasional baru dari tenaga kerja budaya (NIDCL) yang mendukung Utara daripada Selatan dan modal atas tenaga kerja, karena produksi film dan televisi, komputasi, dan olahraga mendunia untuk mencari lokasi, keterampilan, dan tenaga kerja yang patuh. Sebagian besar pendukung kewarganegaraan budaya

berpendapat bahwa identitas dikembangkan dan dijamin melalui konteks budaya. Dalam pembacaan ini, perasaan kolektif tentang diri lebih penting daripada yang monadik, dan hak serta tanggung jawab dapat ditentukan sesuai dengan keanggotaan budaya daripada individu (Fierlbeck, 1996, hlm. 4- 6). Bagi sebagian kritikus, fleksibilitas ini dapat dicapai melalui doktrin hak budaya (Miller, 2002, hlm. 232-233).

Politik kewarganegaraan mengharuskan kita untuk menempatkan identitas universal kita sebagai warga negara di atas kepentingan tertentu yang muncul dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, ada gesekan yang berbeda antara kewarganegaraan dan identitas yang muncul dari aspek lain kehidupan kita. Kepada kewarganegaraan telah diberikan tugas untuk mengatasi perbedaan kompleks yang muncul dalam dunia sehari-hari. Tetapi konsep kewarganegaraan yang menutupi identitas-identitas ini dan, pada gilirannya, hubungan sosial yang melaluinya mereka dibentuk, direproduksi, dan berpotensi diubah, mengancam untuk menjadi wacana yang melegitimasi untuk mempertahankan penindasan yang

didasarkan pada identitas tersebut. Jika semua sederajat dalam ranah politik, yakni sebagai warga negara, bukankah hal ini menurunkan ketidaksetaraan dan perbedaan lainnya ke ranah ekstra atau pra-politik? Wacana kewarganegaraan sering kali tampak sangat tidak siap untuk menghadapi tantangan ini (Young, 1995) (Purvis dan Hunt, 1999, hlm. 461-462).

Kulturalisme liberal telah memberikan posisi superior pada gagasan budaya di atas jenis identitas lain dengan implikasi normatif yang merugikan untuk masalah yang bersangkutan. Kita harus memikirkan kembali gagasan ketidakadilan berdasarkan identitas individu, yang didefinisikan dalam istilah yang lebih luas, dalam konteks negara nasional kontemporer. Sebaliknya, kewarganegaraan yang dibedakan, yang diajukan oleh penulis postmodern, mempertanyakan gagasan kewarganegaraan dan kapasitasnya untuk menjawab masalah kohesi sosial dan partisipasi kaum minoritas (Gianni, 2001, hlm. 228-230).

MENANAMKAN PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK MELALUI PESANTREN

Kehidupan di dalam pesantren, sebagaimana diungkapkan oleh Azra (2002, hlm. 107), merupakan kehidupan islam yang tradisional, yaitu kehidupan yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan oleh para ulama' dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode atau waktu tertentu dalam sejarah Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada di Indonesia merupakan aset pendidikan yang mampu bertahan dalam kehidupan saat ini yang dipenuhi oleh modernitas dan kemajuan berbagai aspek kehidupan, sebagai lembaga pendidikan yang mandiri baik dari struktur kurikulum ataupun pelaksanaannya tanpa ada campur tangan aturan dari pemerintah. Meskipun demikian ternyata pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan serta persatuan dan kesatuan bangsa. hal ini tentu saja bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi pesantren memang memiliki elemen-elemen sub kultur yang unik dan khas sebagai modal uyama untum melakkan hal tersebut, baik pada supra

maupun infra strukturnya.

Keunikan lainya seperti dalam pendapatnya Geerts (1960, hlm. 228-229), Geerts mengutarakan pendapatnya bahwa bertahanya pesantren dalam berbagai zaman ditentukan pula oleh kemampuannya untuk mempertahankan identitas sebagai sistem pendidikan yang didominasi oleh Kyai (Ulama') dan pada saat yang sama mempertegas posisinya sebagai bentuk komplementer dalam pendidikan nasional. Geert berkesimpulan bahwa peran ulama akan tetap bertahan sepanjang ia mendirikan madrasah atau pesantren atau lembaga pendidikan islam yang memuaskan secara religius bagi masyarakat dan sekolah yang berfungsi membantu pertumbuhan negara Indonesia.

Dari berbagai pemicu terjadinya konflik, tentunya akan melahirkan berbagai macam konflik pula. Secara umum, konflik memiliki jenis atau bentuk yang banyak sekali, baik dilihat dari segi pelaku maupun peranannya. Robert G. Owens menyebutkan bahwa konflik dapat terjadi antara seseorang atau unit-unit sosial yaitu intrapersonal atau intragrup (internasional). Konflik juga dialami antara dua orang atau lebih atau unit-unit sosial yang disebut konflik interpersonal,

intergroup, dan internasional. Menurut panduan manajemen sekolah yang dikutip oleh Mujamil Qomar, membagi konflik dalam beberapa tingkat yaitu:

1. Konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang.
2. Konflik Interpersonal, yaitu konflik antara dua individu atau lebih.
3. Konflik Intragroup, yaitu konflik antara dua atau beberapa orang dalam satu grup.
4. Konflik Intergroup, yaitu konflik antar kelompok.
5. Konflik intraorganisasi, yaitu konflik antarunit dalam suatu organisasi.
6. Konflik Interorganisasi, konflik yang terjadi antarorganisasi.

Pendidikan Islam berbasis multikultural dapat dijadikan sebagai upaya menanamkan pendidikan resolusi konflik di pesantren. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan, nilai-nilai multikulturalisme sebagai bagian dari nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang harus ditaati dan dilaksanakan pada pembelajaran dan interaksi para santri di dalam dan di luar pesantren. Sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar maupun dalam bentuk

keteladanan sikap sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai multikultural dalam budaya sekolah dan kegiatan lain baik di dalam maupun di luar sekolah. Secara praktis, pelaksanaan pendidikan Islam berbasis multikultural tersebut dapat dilakukan.

Pendidikan Islam yang berbasis multikultural sebagai upaya menanamkan pendidikan resolusi konflik antar agama di Indonesia dalam pelaksanaannya dapat diterapkan melalui beberapa pola pendekatan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Pendekatan tersebut diterapkan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam Islam melalui beberapa hal berikut: *Pertama*, integrasi pendidikan Islam multikultural dalam materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan komponen yang penting dalam proses pendidikan. Melalui materi pembelajaran, siswa mampu memahami konsep pendidikan multikultural melalui pengenalan beberapa konsep yang lebih operasional dari nilai-nilai pendidikan Islam multikultural tersebut. Konsep yang lebih operasional tersebut diantaranya adalah saling mengenal diantara para santri. Sebagaimana diketahui bahwa

bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang multikultur dalam hal agama, budaya, ras, bahasa dan etnis. Hal ini memberi penekanan bahwa keberagaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media untuk saling mengenal, saling mengisi, saling menghormati dan saling bekerjasama.

Kedua, mengintegrasikan pendidikan Islam berbasis multikultural dalam kultur dan budaya sekolah. Sekolah dalam hal ini pesantren merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan norma yang dijunjung tinggi oleh agama dan masyarakat. Sehingga, dalam hal ini nilai-nilai pendidikan Islam berbasis multikultural yang telah ditanamkan dapat diterapkan di lembaga pendidikan tersebut serta menjadi landasan dalam berperilaku, kegiatan sehari-hari dan segala bentuk aktifitas yang dipraktekkan oleh setiap seluruh elemen pesantren, mulai dari pimpinan pondok pesantren, para pengajar (ustadz dan ustadzah), petugas administrasi, santri dan masyarakat lingkungan pesantren. Pendidikan sebagai proses pembudayaan nilai-nilai multikultural dapat dimulai pada lingkup lingkungan pendidikan,

selanjutnya dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia.

Selain hal di atas, dalam menanamkan pendidikan resolusi konflik di pesantren, dapat pula dilakukan dengan cara melakukan pelatihan manajemen konflik bagi para santri yang bertujuan untuk melatih para santri dalam merespon dan menyelesaikan konflik. Dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan manajemen konflik diharapkan para santrimampu membangun mental yang kuat bagi santri untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola konflik secara mandiri serta santri diharapkan sadar akan pentingnya pengelolaan konflik dan penyelesaiannya dengan tanpa ada kekerasan.

SIMPULAN

Sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa, pondok pesantren memiliki perana yang penting dalam mewujudkan kerukunan bangsa Indonesia dengan melakukan perannya ikut bertanggung

jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Sebagai konsekwensinya, dituntut dapat berperan serta dalam memecahkan masalah dan tantangan. Pendidikan resolusi konflik yang ditanamkan kepada para santri merupakan suatu upaya membentuk karakter peserta didik yang mampu memecahkan masalah di dalam masyarakat. Tanpa adanya pendidikan resolusi konflik yang dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di pesantren sulit bagi santri

untuk memahami dan melaksanakan pendidikan resolusi konflik yang tujuannya adalah membentuk kewarganegaraan yang mampu mengetahui, memahami, serta mampu memecahkan masalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan resolusi konflik di pesantren dapat menjadi alternatif dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu ditengah masyarakat yang multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 2002)
- Creswell, W. John. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Clifford Gerrts, *The Javanese kijaji: the Changging roleof Cultural broker, Comparatif Studies in Society and History*, 2 (2), 1960
- Gianni, M. (1998). Taking multiculturalism seriously: political claims for a differentiated citizenship. *Citizenship after liberalism*, 222.
- Jonker Jan, Bartjan J.W.Pennink & Sari Wahyuni, 2011, *Metodologi Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Joppke, Ch. (2002) "Multicultural Citizenship" pp. 245-257 in Isin, F. E. and B. S. Turner (eds.) *Handbook of Citizenship*. London: SAGE Publication
- Kymlicka, W. (2002) *Contemporary Political Philosophy*, Oxford University Press. pp. 327-377.
- Miller, T. (2002) "Cultural Citizenship" pp. 231-243 in Isin, F. E. and B. S. Turner (eds.) *Handbook of Citizenship*. London: SAGE Publication.
- Muchasan, A. (2018). Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Sirojul Ulum Semanding Pare Kediri). *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, 4(1), 77-99.
- Mundzier Suparta, *Islamic Multikultural Education*, (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008)
- Purvis, T. and A. Hunt (1999) "Identity Versus Citizenship: Transformations in the Discourse and Practices of Citizenship" *Social & Legal Studies* 8(4):457-482
- Qomar, M. (2007). Manajemen Pendidikan Islam [Islamic Education Management]. *Malang: Erlangga*.
- Shachar, A. (2001). *Multicultural jurisdictions: Cultural differences and women's rights*. Cambridge University Press.
- Wibowo, A.P. and Wahono, M., 2017. Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), pp.196-205.